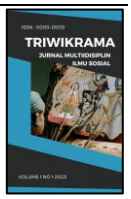
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM MENDUKUNG AKSES PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Ayudya Puspitasari[1], Almira Nabila Putri[2], Fadhilatun Nisa[3], Salsa Bila[4], Wilda Sumarsyah[5], Meirinawati[6]

[1-6] Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

24040674051@mhs.unesa.ac.id,
24040674054@mhs.unesa.ac.id,
24040674066@mhs.unesa.ac.id,
24040674081@mhs.unesa.ac.id,
wildasumarsyah@unesa.ac.id,
meirinawati@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

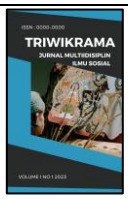
Program Indonesia Pintar (PIP) membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap bersekolah dan tidak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi PIP pada jenjang SMP di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dalam mendukung akses pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumentasi atas data sekunder berupa data penyaluran PIP 2025, publikasi BPS, peraturan pelaksanaan PIP, dan penelitian terdahulu, yang dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña berdasarkan empat aspek teori implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasilnya, PIP pada 2025 menjangkau 1.116 penerima dari 4.136 siswa SMP tahun ajaran 2025/2026 dengan dana Rp669.000.000. Sekolah dan SIPINTAR menjadi saluran informasi, anggaran dan data administrasi tersedia, kewenangan sekolah bertambah, dan pembagian tugas pelaksana jelas. Faktor pendukungnya meliputi regulasi, anggaran, serta Dapodik dan SIPINTAR, sedangkan penghambatnya meliputi ketepatan data, kejelasan informasi aktivasi rekening dan jadwal pencairan, serta beban administrasi sekolah. PIP telah dilaksanakan dan membantu pemenuhan kebutuhan personal pendidikan siswa, tetapi kontribusinya terhadap keberlanjutan pendidikan belum dapat dipastikan karena data sekunder belum menunjukkan pemanfaatan dana dan kondisi penerima. Pemahaman penerima dan komitmen pelaksana juga belum dapat dinilai.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar; implementasi kebijakan; akses pendidikan; sekolah menengah pertama; Kecamatan Bangil

ABSTRACT

The Program Indonesia Pintar (PIP) or Smart Indonesia Program assists students from impoverished or vulnerable-to-poverty families, ensuring they remain in school and do not drop out due to economic constraints. This study aims to describe the implementation of the PIP at the junior high school (SMP) level in Bangil District, Pasuruan Regency, in terms of supporting

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



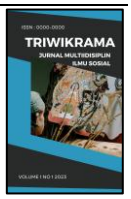
access to education. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing documentation analysis of secondary data including 2025 PIP distribution records, Statistics Indonesia (BPS) publications, official PIP implementation regulations, and prior research. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, framed by George C. Edwards III's implementation theory, which focuses on four key aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that in 2025, the PIP reached 1,116 recipients out of 4,136 junior high school students for the 2025/2026 academic year, with a total disbursement of IDR 669,000,000. Schools and the SIPINTAR system served as primary channels for information; budget and administrative data were available; schools were granted increased authority; and the division of tasks among implementers was clearly defined. Supporting factors included established regulations, budget availability, and the use of the Dapodik (Education Management Information System) and SIPINTAR platforms. Conversely, challenges included data accuracy, the clarity of information regarding account activation and disbursement schedules, and the administrative burden placed on schools. While the PIP has been implemented and helps meet students' personal educational needs, its contribution to long-term educational continuity remains uncertain, as the available secondary data do not specify how the funds were utilized or the current status of the recipients. Furthermore, the level of understanding among recipients and the commitment of those responsible for implementation could not be assessed.

Keywords: Program Indonesia Pintar; policy implementation; access to education; junior high school; Bangil District

PENDAHULUAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap memperoleh layanan pendidikan melalui pemberian bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026, PIP Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini diarahkan untuk meringankan biaya pendidikan, memperluas akses belajar, mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, serta mencegah peserta didik putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, tas, transportasi, dan uang saku, sehingga diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sasaran penerima PIP diprioritaskan bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan program, terutama yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, berstatus warga negara Indonesia, serta terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan. Proses pendataan dan pengusulan melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, serta Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Pada tahun 2026, satuan pendidikan juga memiliki kewenangan untuk memverifikasi dan mengusulkan calon penerima melalui aplikasi SIPINTAR setelah memperbarui serta memvalidasi data peserta didik di Dapodik. Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 171 Tahun 2026, peserta didik jenjang SMP, termasuk SMPLB dan Paket B, memperoleh bantuan sebesar Rp375.000 per semester atau Rp750.000 untuk dua semester dalam satu tahun. Sementara itu, peserta didik kelas awal dan kelas akhir yang hanya menerima bantuan untuk satu semester memperoleh Rp375.000. Dana disalurkan melalui rekening atas nama peserta didik penerima dan digunakan untuk kebutuhan personal yang berkaitan dengan pendidikan sesuai ketentuan program, sehingga keaktifan rekening menjadi bagian penting dalam proses penerimaan bantuan.

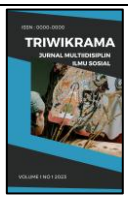
Dalam kaitannya dengan akses pendidikan, PIP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi hambatan ekonomi yang dapat memengaruhi kesempatan peserta didik dalam memperoleh dan melanjutkan pendidikan. Akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan masuk sekolah, tetapi juga kemampuan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran hingga menyelesaikan jenjang pendidikannya. Meskipun demikian, keberlanjutan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bantuan PIP, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, jarak tempat tinggal dengan sekolah, dan kualitas layanan pendidikan. Oleh sebab itu, pelaksanaan PIP perlu dilihat melalui ketepatan sasaran penerima, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, serta koordinasi pihak-pihak yang terlibat agar bantuan dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Program Indonesia Pintar (PIP)

   Berdasarkan hasil pembahasan, prioritas perbaikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) perlu diarahkan pada peningkatan ketepatan pendataan dan verifikasi penerima agar bantuan benar-benar diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



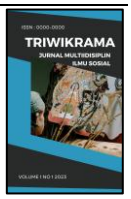
pelaksanaan program, sedangkan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan berperan dalam mengoordinasikan serta memantau pelaksanaannya. Pihak sekolah bertanggung jawab memperbarui data peserta didik melalui Dapodik, memverifikasi dan mengusulkan calon penerima, serta memberikan informasi dan pendampingan kepada peserta didik maupun orang tua. Sementara itu, lembaga penyalur perlu memastikan proses aktivasi rekening dan pencairan bantuan berjalan tepat waktu sesuai ketentuan.

Selain ketepatan pendataan, perbaikan juga perlu diprioritaskan pada penguatan koordinasi, penyampaian informasi, dan pengawasan penyaluran bantuan agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun keterlambatan pencairan. Setiap pihak perlu menjalankan tanggung jawabnya secara jelas dan saling berkoordinasi untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan wawancara dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, lembaga penyalur, peserta didik penerima bantuan, dan orang tua guna memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai kendala pelaksanaan serta manfaat PIP dalam mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP di Kecamatan Bangil.

2. Konsep Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan kesempatan dan kemampuan setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa mengalami hambatan, baik dari segi ekonomi, sosial, geografis, maupun faktor lainnya. Akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup kemampuan peserta didik untuk masuk sekolah, mengikuti proses pembelajaran, dan melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan jenjang pendidikannya. Dengan demikian, tersedianya sekolah belum tentu menjamin seluruh masyarakat dapat memperoleh pendidikan apabila masih terdapat hambatan yang membatasi kesempatan mereka. Salah satu faktor yang memengaruhi akses pendidikan adalah kondisi ekonomi keluarga. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin sering menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan personal pendidikan, seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, tas, dan biaya transportasi. Selain itu, kondisi sosial, dukungan keluarga, jarak tempat tinggal dengan sekolah, serta ketersediaan fasilitas pendidikan juga turut memengaruhi kesempatan peserta didik dalam memperoleh pendidikan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



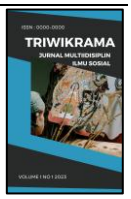
Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi hambatan ekonomi melalui pemberian bantuan biaya personal pendidikan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu peserta didik memenuhi kebutuhan sekolah, mencegah putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akses pendidikan dipahami sebagai kesempatan dan kemampuan siswa SMP untuk memperoleh, mengikuti, serta melanjutkan pendidikan dengan dukungan pemenuhan kebutuhan personal pendidikan. Meskipun demikian, keberlanjutan pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan ketersediaan layanan pendidikan yang memadai.

3. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menjadi proses penerjemahan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan serta ketersediaan dukungan yang memadai. Dalam penelitian ini, analisis implementasi menggunakan model George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* (1980), yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Komunikasi meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi; sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas; disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta kesediaan pelaksana; sedangkan struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, prosedur kerja, dan koordinasi antarorganisasi.

Keempat variabel tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SMP di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Fokus analisis komunikasi diarahkan pada penyampaian informasi mengenai persyaratan penerima, proses pendataan, penetapan bantuan, aktivasi rekening, dan pencairan dana kepada sekolah, peserta didik, serta orang tua. Aspek sumber daya difokuskan pada ketersediaan anggaran, tenaga pelaksana, kualitas data peserta didik, dan fasilitas pendukung pelaksanaan PIP. Aspek disposisi digunakan untuk menelaah sikap, komitmen, dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam menjalankan program. Sementara itu, struktur birokrasi dianalisis melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab, mekanisme pendataan dan verifikasi penerima, prosedur penyaluran bantuan, serta koordinasi antara pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga penyalur. Melalui keempat aspek tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan proses pelaksanaan PIP sekaligus mengidentifikasi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



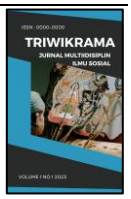
faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat program dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik.

4. Penelitian Terdahulu

Riska dan Rostyaningsih (2018) meneliti implementasi PIP di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog, Kudus, secara deskriptif kualitatif dengan teori Van Meter dan Van Horn, dan merekomendasikan koordinasi sekolah dengan bank penyalur, sumber daya manusia yang memadai, serta pemahaman orang tua terhadap ketentuan program. Amalia et al. (2022) di SMP Negeri 2 Maiwa, Kabupaten Enrekang menggunakan empat aspek yang sama dengan penelitian ini. Mereka menemukan sumber daya yang baik, tetapi komunikasi belum efektif karena sebagian siswa tidak mengetahui namanya terdaftar sebagai penerima, dan struktur birokrasi belum berjalan baik karena standar operasional sekolah dan bank penyalur berbeda sehingga penyaluran terlambat. Sholicha dan Sukmana (2025) meneliti PIP di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, dengan teori Edwards III. Mereka menemukan sumber daya yang mencukupi, tetapi sebagian wali murid belum memahami prosedur pencairan dan sebagian siswa yang memenuhi syarat tidak terakomodasi sebagai penerima.

Dari sisi akses pendidikan, Yusup et al. (2019) mengevaluasi PIP di SMP Negeri 7 Salatiga dengan Discrepancy Evaluation Model dan menemukan program berjalan sesuai Permendikbud serta bermanfaat bagi siswa kurang mampu untuk membeli keperluan sekolah dan membayar biaya administrasi, tetapi dananya masih sangat kurang memenuhi kebutuhan pendidikan setiap tahun. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan persoalan berulang pada pemahaman penerima, koordinasi sekolah dengan bank penyalur, dan ketepatan seleksi penerima. Penelitian ini sejalan dalam pendekatan kualitatif deskriptif dan fokus pada pelaksanaan PIP, memakai empat aspek yang sama dengan Amalia et al. (2022) serta Sholicha dan Sukmana (2025), dan mengaitkan program dengan akses pendidikan seperti Yusup et al. (2019). Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada satu sekolah sebelum Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 terbit, sedangkan penelitian ini mengkaji SMP di Kecamatan Bangil melalui studi dokumentasi atas data sekunder. Karena itu, pemahaman orang tua dan komitmen pelaksana belum dapat dinilai dan menjadi bahan kajian lanjutan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mendukung akses pendidikan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber resmi dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dokumen digunakan untuk memahami suatu kebijakan melalui penelaahan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Bowen, 2009).

Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan PIP, sedangkan konsep akses pendidikan digunakan untuk melihat peran program dalam mendukung kesempatan dan keberlanjutan pendidikan siswa SMP. Sumber data meliputi data penyaluran PIP tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, peraturan dan petunjuk pelaksanaan PIP, serta buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini tidak melakukan wawancara maupun observasi lapangan sehingga seluruh informasi diperoleh dari data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan penelaahan dokumen sesuai fokus penelitian, terutama mengenai penyaluran bantuan, mekanisme pendataan penerima, serta kondisi pendidikan di wilayah penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel pendukung untuk menggambarkan implementasi PIP serta perannya dalam mendukung akses pendidikan siswa SMP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pelaksanaan PIP pada Jenjang SMP di Kecamatan Bangil

   Kecamatan Bangil merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan tabel statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan tahun ajaran 2025/2026, terdapat 12 SMP di Kecamatan Bangil yang terdiri atas 4 SMP negeri dan 8 SMP swasta, dengan jumlah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

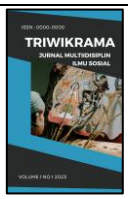
keseluruhan 4.136 peserta didik (BPS Kabupaten Pasuruan, 2026). Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan tunai bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan personal pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan biaya transportasi. Pelaksanaan program ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pengusulan dan penetapan penerima, hingga aktivasi rekening serta pencairan dana. Dalam proses tersebut, sekolah berperan membantu kelengkapan data dan penyampaian informasi kepada peserta didik maupun orang tua, sedangkan status penerimaan dapat diperiksa melalui laman SIPINTAR.

Berdasarkan data penyaluran PIP tahun 2025, terdapat 1.116 peserta didik SMP di Kecamatan Bangil yang tercatat dalam data penyaluran dengan total dana sebesar Rp669.000.000. Jumlah tersebut terdiri atas 799 siswa kategori pemberian sebesar Rp457.875.000, 139 siswa kategori aktivasi nominasi sebesar Rp103.875.000, dan 178 siswa kategori pemberian relaksasi sebesar Rp107.250.000 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Jika dibandingkan secara aritmetis dengan jumlah keseluruhan peserta didik SMP berdasarkan data BPS, jumlah tersebut setara dengan sekitar 26,98%. Namun, angka ini hanya memberikan gambaran perbandingan jumlah penerima dengan jumlah siswa dan bukan ukuran efektivitas maupun ketepatan sasaran program. Hal ini karena data penyaluran PIP dan data jumlah siswa BPS berasal dari periode pendataan yang berbeda, serta penetapan penerima didasarkan pada kriteria tertentu. Data tersebut menunjukkan bahwa PIP telah menjangkau peserta didik di Kecamatan Bangil. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaannya tetap perlu dilihat dari ketepatan pendataan, penyampaian informasi, kemudahan prosedur, dan koordinasi antarpihak agar bantuan dapat diterima serta dimanfaatkan sesuai tujuan program.

2. Implementasi PIP Berdasarkan Aspek Komunikasi

Menurut George C. Edwards III (1980), komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup tiga aspek, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), komunikasi diperlukan untuk menyampaikan informasi mengenai persyaratan penerima, proses pendataan, penetapan bantuan, aktivasi rekening, hingga pencairan dana kepada peserta didik dan orang tua. Dari aspek transmisi, sekolah memiliki peran sebagai penghubung

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



antara pemerintah dan kelompok sasaran melalui penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program. Selain itu, keberadaan SIPINTAR memberikan akses bagi peserta didik maupun orang tua untuk memeriksa status penerimaan bantuan secara mandiri.

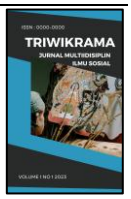
Dari aspek kejelasan, informasi yang disampaikan perlu mencakup persyaratan penerima, status bantuan, ketentuan aktivasi rekening, dokumen yang harus disiapkan, serta tahapan pencairan agar peserta didik dan orang tua dapat memahami prosedur yang harus dilakukan. Sementara itu, aspek konsistensi menuntut agar informasi yang disampaikan oleh pihak terkait sesuai dengan ketentuan resmi pemerintah, terutama mengenai persyaratan, besaran bantuan, dan tahapan penyaluran. Namun, dokumen sekunder yang digunakan belum memberikan gambaran khusus mengenai sejauh mana informasi tersebut telah diterima dan dipahami oleh peserta didik maupun orang tua di setiap SMP. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi belum dapat dinilai secara menyeluruh. Meskipun demikian, penyampaian informas.

3. Implementasi PIP Berdasarkan Aspek Sumber Daya

Menurut George C. Edwards III (1980), sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup anggaran, sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), seluruh komponen tersebut diperlukan untuk mendukung proses pendataan hingga penyaluran bantuan kepada peserta didik. Berdasarkan data penyaluran PIP tahun 2025, terdapat 1.116 siswa SMP di Kecamatan Bangil yang tercatat dalam data penyaluran bantuan dengan total dana sebesar Rp669.000.000. Jumlah tersebut terdiri atas 799 siswa kategori pemberian sebesar Rp457.875.000, 139 siswa kategori aktivasi nominasi sebesar Rp103.875.000, dan 178 siswa kategori pemberian relaksasi sebesar Rp107.250.000 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Selain anggaran, informasi administrasi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga menjadi bagian penting dalam proses pengusulan dan penetapan penerima. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (2025) menjelaskan bahwa kelengkapan dan validitas data peserta didik diperlukan agar proses pendataan berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, sumber daya manusia dan fasilitas pendukung diperlukan untuk menunjang pengelolaan administrasi serta pelayanan kepada penerima bantuan. Namun, dokumen yang digunakan belum memberikan informasi terperinci mengenai kecukupan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



petugas, kemampuan pelaksana, maupun kondisi fasilitas pada masing-masing SMP di Kecamatan Bangil. Dengan demikian, dukungan anggaran dan informasi administrasi telah terlihat dalam pelaksanaan PIP, tetapi kecukupan seluruh sumber daya belum dapat dinilai secara menyeluruh.

4. Implementasi PIP Berdasarkan Aspek Disposisi Pelaksana

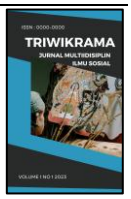
Dalam teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memahami tujuan kebijakan cenderung bekerja sesuai ketentuan, sedangkan komitmen yang lemah dapat menurunkan kualitas pelaksanaan, sehingga kebijakan yang dirumuskan dengan baik pun dapat tidak berjalan optimal. Karena itu, disposisi menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi PIP.

Dalam pelaksanaan PIP, sekolah adalah pelaksana yang paling dekat dengan peserta didik dan orang tua. Sekolah berperan memastikan data peserta didik di Dapodik lengkap dan valid serta memberikan penandaan layak PIP, dan menyampaikan informasi tentang status penerimaan dan mekanisme pencairan. Peran ini bertambah pada ketentuan terbaru, karena sekolah kini berwenang memverifikasi dan mengusulkan calon penerima melalui SIPINTAR setelah memperbarui data Dapodik. Dari sudut pandang disposisi, kewenangan ini menuntut komitmen yang lebih tinggi, sebab ketelitian pelaksana menentukan apakah bantuan sampai pada siswa yang membutuhkan. Komitmen juga tampak dari kesediaan memberi pendampingan terkait rekening yang belum aktif dan jadwal pencairan yang bertahap. Pelaksana yang responsif membantu orang tua memahami langkah yang perlu dilakukan, sedangkan sikap yang kurang peduli berpotensi membuat penerima terlambat atau tidak memperoleh bantuan sesuai haknya.

Namun, penelitian ini memakai studi dokumentasi atas data sekunder tanpa wawancara atau observasi, dan dokumen yang digunakan belum memuat sikap, pemahaman, atau komitmen pelaksana di setiap SMP di Kecamatan Bangil. Penyaluran bantuan kepada 1.116 siswa pada tahun 2025 menunjukkan program berjalan, tetapi tidak dapat dijadikan ukuran komitmen pelaksana. Karena itu, disposisi baru dapat dibahas berdasarkan peran dan tanggung jawab dalam ketentuan program, sedangkan kenyataan di lapangan memerlukan penelitian lanjutan melalui wawancara dengan pihak sekolah dan instansi terkait.

5. Implementasi PIP Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi

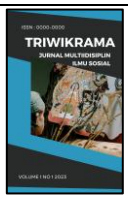
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurut George C. Edward III (1980), aspek ini berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan prosedur kerja antar pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga perbankan membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas. Berdasarkan data resmi PIP Kemendikdasmen tahun 2025, Kecamatan Bangil tercatat memiliki 1.116 peserta didik SMP dengan total bantuan sebesar Rp669.000.000. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan administrasi yang terarah, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan. Pemerintah pusat melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) berperan dalam pengelolaan dan penetapan penerima, dinas pendidikan mendukung koordinasi serta pengawasan, sekolah bertanggung jawab memperbarui data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memeriksa kelengkapan data, dan menyampaikan informasi kepada peserta didik maupun orang tua, sedangkan lembaga perbankan membantu proses aktivasi rekening dan pencairan dana. Pelaksanaan program juga didukung oleh prosedur yang mengatur tahapan pendataan, pengusulan, verifikasi, penetapan, hingga penyaluran bantuan. Melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026, pemerintah memperkuat mekanisme pelaksanaan PIP, termasuk kewenangan sekolah untuk memverifikasi dan mengusulkan calon penerima melalui aplikasi SIPINTAR setelah memperbarui data Dapodik.

Selain pembagian tugas dan prosedur kerja, koordinasi antar pelaksana diperlukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan dengan baik. Pemerintah pusat, dinas pendidikan, sekolah, dan bank penyalur perlu menjalin komunikasi agar proses pendataan hingga pencairan bantuan berjalan terarah serta meminimalkan kesalahan informasi dan kendala administrasi. Sekolah juga perlu memberikan informasi kepada orang tua mengenai persyaratan, status penerimaan, dan mekanisme pencairan bantuan. Pengawasan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bantuan diterima oleh peserta didik yang memenuhi persyaratan dan dimanfaatkan sesuai tujuan program. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan data, pemantauan penyaluran, serta evaluasi terhadap kendala pelaksanaan. Selain itu, layanan SIPINTAR dan SP4N-LAPOR! dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan PIP. Dengan demikian, struktur birokrasi yang didukung pembagian tanggung jawab yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



jelas, prosedur terarah, koordinasi, dan pengawasan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan penyaluran bantuan. Keberhasilan PIP tidak hanya dilihat dari jumlah penerima dan bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kelancaran pelaksanaan serta manfaatnya dalam mengurangi hambatan ekonomi dan mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

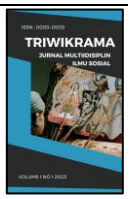
6. Peran PIP dalam Mendukung Akses Pendidikan Siswa SMP

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap memperoleh layanan pendidikan. Pada jenjang SMP, bantuan ini berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan personal pendidikan, seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, tas, dan biaya transportasi. Dengan adanya bantuan tersebut, beban pengeluaran pendidikan keluarga diharapkan dapat berkurang sehingga keterbatasan ekonomi tidak sepenuhnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan data resmi PIP tahun 2025, terdapat 1.116 siswa SMP di Kecamatan Bangil yang tercatat dalam data penyaluran bantuan dengan total dana sebesar Rp669.000.000. Sementara itu, publikasi BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mencatat jumlah peserta didik SMP di Kecamatan Bangil sebanyak 4.136 siswa yang tersebar di 12 sekolah, terdiri atas 4 SMP negeri dan 8 SMP swasta (BPS Kabupaten Pasuruan, 2025; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Kedua data tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PIP dan kondisi pendidikan di wilayah penelitian. Namun, karena berasal dari periode pendataan yang berbeda, data tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengukur ketepatan sasaran maupun efektivitas program.

Selain membantu memenuhi kebutuhan personal pendidikan, PIP juga diarahkan untuk mencegah peserta didik putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi serta memberikan kesempatan kepada anak yang telah berhenti sekolah untuk kembali memperoleh layanan pendidikan. Meskipun demikian, kontribusi PIP terhadap keberlanjutan pendidikan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah penerima dan dana yang disalurkan. Hal tersebut karena akses pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, dukungan orang tua, lingkungan sosial, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Data sekunder dalam penelitian ini juga belum menunjukkan pemanfaatan dana maupun kondisi pendidikan siswa setelah menerima bantuan. Dengan demikian, PIP dapat dipahami sebagai salah satu

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



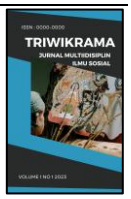
instrumen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan siswa SMP di Kecamatan Bangil, tetapi besarnya dampak terhadap keberlanjutan pendidikan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PIP

Faktor pendukung yang utama adalah regulasi yang jelas, yaitu Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026, Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026, dan Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 2026 tentang besaran bantuan. Ketiganya menjadi pedoman tugas, prosedur, dan besaran bantuan bagi pelaksana. Dari sisi anggaran, dukungan juga tersedia dan tersalurkan, karena pada tahun 2025 PIP jenjang SMP di Kecamatan Bangil menjangkau 1.116 siswa dengan total dana Rp669.000.000. Pelaksanaan program turut ditopang sistem pendataan dan informasi yang terpadu, sebab Dapodik menjadi dasar pengusulan dan penetapan penerima, sedangkan SIPINTAR memungkinkan status penerimaan diperiksa secara mandiri atau melalui sekolah. Kewenangan verifikasi dan pengusulan yang kini dimiliki sekolah juga dapat menyederhanakan prosedur dan memperkuat peran sekolah dalam mengidentifikasi siswa yang membutuhkan. Selain itu, kanal pengaduan SP4N-LAPOR! membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah terkait PIP.

Di sisi penghambat, masalah yang paling mendasar adalah kualitas data. Kelengkapan dan validitas data Dapodik menentukan proses pengusulan dan penetapan, sehingga data yang tidak lengkap atau tidak sesuai berpotensi membuat siswa yang layak tidak terdata atau terkendala saat penetapan. Hambatan berikutnya terkait aktivasi rekening, karena bantuan hanya dapat disalurkan ke rekening yang aktif, sehingga informasi yang kurang jelas dapat membuat penerima terlambat memperoleh dana. Data penyaluran 2025 mencatat 139 siswa pada kategori aktivasi nominasi, yang menunjukkan tahap ini memang ada dalam pelaksanaan di Bangil. Penyaluran yang bertahap juga membuat waktu pencairan antarsiswa berbeda, sehingga informasi jadwal dan status perlu terus diperbarui agar tidak membingungkan. Selain itu, kewenangan baru sekolah menambah beban administrasi, karena ketepatan pengusulan kini bergantung pada ketelitian sekolah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KESIMPULAN

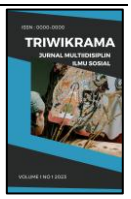
Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SMP di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, telah berjalan dan menjangkau peserta didik. Data penyaluran tahun 2025 mencatat 1.116 siswa penerima dengan total dana Rp669.000.000, setara sekitar 26,98% dari 4.136 siswa SMP tahun ajaran 2025/2026 berdasarkan data BPS. Angka ini hanya perbandingan jumlah penerima dengan jumlah siswa, bukan ukuran efektivitas atau ketepatan sasaran program, karena kedua data berasal dari periode pendataan yang berbeda. Berdasarkan teori Edwards III, sekolah dan SIPINTAR menjadi saluran informasi, anggaran dan data administrasi tersedia, serta pembagian tugas antarpelaksana sudah jelas. Peran dan tanggung jawab pelaksana juga sudah diatur dalam ketentuan, terutama kewenangan baru sekolah. Namun, pemahaman penerima, kecukupan petugas dan fasilitas, serta komitmen pelaksana di lapangan belum dapat dinilai karena penelitian ini bersumber dari dokumen sekunder.

Dalam kaitannya dengan akses pendidikan, PIP berperan membantu pemenuhan kebutuhan personal pendidikan siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Kontribusinya terhadap keberlanjutan pendidikan belum dapat dipastikan, karena data penyaluran tidak menunjukkan pemanfaatan dana maupun kondisi penerima setelah menerima bantuan. Faktor pendukung implementasi meliputi regulasi, anggaran, serta sistem Dapodik dan SIPINTAR, sedangkan faktor penghambatnya meliputi ketepatan data, kejelasan informasi tentang aktivasi rekening dan jadwal pencairan, beban administrasi sekolah, serta faktor lain di luar program.

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung akses pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bangil, diperlukan upaya peningkatan pelaksanaan program agar bantuan dapat diterima secara tepat sasaran dan memberikan manfaat secara optimal. Pemerintah dan instansi pendidikan terkait diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pendataan serta verifikasi calon penerima melalui pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga penyalur perlu diperkuat agar proses pengusulan, penetapan, hingga pencairan bantuan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai prosedur.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pihak sekolah juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada peserta didik maupun orang tua terkait persyaratan, status penerimaan, serta mekanisme pencairan bantuan. Pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana PIP perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai kebutuhan pendidikan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian secara langsung melalui wawancara dengan pihak sekolah, penerima bantuan, orang tua, dan instansi terkait agar dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan PIP serta kendala yang dihadapi dalam mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, S., Abdi, & Haerana. (2022). Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 3*(4), 1141–1150. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8634/5288

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2026). *Jumlah satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru, serta peserta didik sekolah menengah pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut kecamatan di Kabupaten Pasuruan, 2025/2026* [Tabel statistik]. https://pasuruankab.bps.go.id/id/statistics-table

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

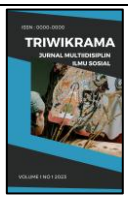
Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Data penyaluran Program Indonesia Pintar tahun 2025: Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan*. Portal Program Indonesia Pintar.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (n.d.). *FAQ Program Indonesia Pintar*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/faq-program-indonesia-pintar/

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2025, 8 Februari). *Data siswa di Dapodik penentu seorang siswa memperoleh bantuan PIP*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/data-siswa-di-dapodik-penentu-seorang-siswa-memperoleh-bantuan-pip/

Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus. *Journal of Management and Public Policy, 7*(2), 608–631. https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.20317

Sholicha, I. D. A., & Sukmana, H. (2025). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (studi kasus di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 11*(1), 172–185. https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4362

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di sekolah menengah pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 6*(1), 44–53. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53